

**KAJIAN KELOMPOK PETERNAK DI JAWA BARAT  
BAGIAN TIMUR**

Oleh:

**Achmad Firman, SPt., MSi**

**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
JANUARI 2007**

## LEMBAR PENGESAHAN

### Penelitian Mandiri

- 
1. a. Judul Penelitian :  
    **“Kajian Kelompok Peternak di Jawa Barat Bagian Timur”**  
    b. Bidang Ilmu : Pertanian/Ekonomi Peternakan
- 
2. Peneliti  
    a. Nama Lengkap dan Gelar : Achmad Firman, SPt., MSi  
    b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
    c. Gol/Pangkat/NIP : IIIb/Penata TK I/132 297 365  
    d. Jabatan Fungsional : Lektor  
    e. Jabatan Struktural : -  
    f. Fakultas/Jurusan : Peternakan/Sosial Ekonomi Peternakan  
    g. Pusat Penelitian : Universitas Padjadjaran
- 
3. Lokasi Penelitian : Indonesia
- 
4. Kerjasama dengan institusi lain : Tidak ada
- 
5. Sumber Dana : -
- 

Bandung, Januari 2007

Mengetahui  
Kepala Laboratorium Ekonomi

Peneliti

Ir. Sri Rahayu, MS  
NIP: 130 703 522

Achmad Firman, SPt., MSi  
NIP: 132 297 365

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahirobbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga paper ini yang berjudul “Kajian Kelembagaan Peternak di Jawa Barat Bagian Timur” dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan rasa terima kasih disampaikan kepada Kepala Laboratorium Ekonomi Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis untuk berkarya.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

**Penurlis,**

## BAB 1 PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Dalam mencapai visi Jawa Barat sebagai “...*Propinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibukota Negara*”. Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah menetapkan Agribisnis sebagai salah satu “*core*” bisnisnya. Oleh karena itu, peranan sektor pertanian menjadi sangat strategis dalam pembangunan masyarakat Jawa Barat. Menurut Wachyan (2002), dalam membangun agribisnis di Jawa Barat, setidaknya sektor pertanian mempunyai empat fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Ekonomi
- b. Fungsi Ketahanan Pangan
- c. Fungsi Stabilitas Ekonomi
- d. Fungsi Kelestarian Lingkungan

Oleh karena itu, pembangunan peternakan seperti termuat dalam tujuan pertama pembangunan peternakan yaitu meningkatnya mutu dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan dalam memfasilitasi pembangunan peternakan. Begitu pentingnya peran SDM sebagai salah satu komponen pembangunan peternakan, maka kebijakan pembangunan peternakan harus dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul terkait hal tersebut. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat, perlu didukung oleh data yang tepat/akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data kelembagaan kelompok peternak khususnya kelompok peternak yang bergerak pada tingkat budidaya (*on-farm*), sarana produksi/input (*off-farm* hulu) maupun agroindustri (*off-farm hilir*).

Keberadaan data dan informasi tentang kelembagaan kelompok peternak masih relatif terbatas sehingga data tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan peternakan termasuk kelembagaan secara strategis. Data dan informasi merupakan sumber utama untuk mengetahui maju dan mudurnya suatu kegiatan. Permasalahan lain mengenai data statistik ini adalah dalam hal akurasi yang sering dipertanyakan, sehingga diperlukan kejelian dalam menggunakannya. Dalam kasus-kasus tertentu, data kelembagaan kelompok peternak atau yang terkait dengan komponen tenaga kerja di bidang peternakan tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti situasi perkembangan usaha peternakan sehingga diperlukan data dan informasi yang terus di *update* agar dinamika kelembagaan kelompok peternak tersebut dapat terus dipantau.

Selama ini, kelembagaan peternak hanya dipandang sebagai suatu objek (*target groups*) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program dari berbagai institusi, baik pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, ataupun institusi lainnya. Biasanya, kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh institusi-institusi tersebut lebih bersifat sentralistik atau *top down* dan seragam. Kegiatan yang sentralistik tersebut menyebabkan kreativitas lokal tidak dapat muncul karena telah dirancangnya kegiatan tersebut sedemikian rupa. Di samping itu, belum tentu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan peternak pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan database kelembagaan kelompok peternak bertujuan untuk membentuk sistem informasi kelembagaan kelompok peternak

di Jawa Barat dengan data yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa dari lapangan. Melalui kegiatan penyusunan database ini diharapkan diperoleh data kelembagaan kelompok peternak yang valid sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan peternakan, baik bagi penyusun kebijakan publik (pemerintah) maupun stakeholder lainnya yang terkait. Selanjutnya data tersebut dapat disusun kedalam suatu sistem informasi kelembagaan, sehingga dapat di *update* setiap saat oleh pihak yang berkompeten dan menghasilkan *data series* yang dinamis.

## **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengkaji potensi kelembagaan kelompok peternak di wilayah Propinsi Jawa Barat khususnya kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (on-farm). Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mengidentifikasi jenis dan jumlah kelembagaan kelompok peternak khususnya di bidang budidaya (on-farm) di wilayah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis;
2. Mempelajari karakteristik, permasalahan dan kendala pengembangan kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (on-farm) pada setiap wilayah kajian;
3. Mempelajari peran dan fungsi serta dinamika kelembagaan kelompok peternak;
4. Mempelajari peran/kontribusi usahaternak terhadap pendapatan peternak anggota lembaga/kelompok;
5. Menyusun rekomendasi pengembangan kelembagaan kelompok peternak sesuai dengan kondisi kelembagaan pada setiap wilayah kajian.

## **1.3 Keluaran**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Database kelembagaan kelompok peternak di Jawa Barat khususnya kelembagaan di bidang budidaya (on-farm);
2. Profil kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (on-farm);
3. Rekomendasi pengembangan kelembagaan kelompok peternak khususnya di bidang budidaya (on-farm).

## **1.4 Ruang Lingkup**

### **a. Wilayah kajian :**

Wilayah kajian meliputi 13 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis.

### **b. Kelembagaan kelompok peternak :**

Kajian/kegiatan difokuskan pada kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (*on-farm*) ditingkat kelompok.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

---

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian dari sistem dan usaha agribisnis, dengan demikian pembangunan peternakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem agribisnis. Secara umum kebijakan pembangunan peternakan, lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yang terkait dengan produksi dan faktor produksi, pengembangan usaha, sumberdaya (alam, teknologi, modal, dan manusia), serta pengembangan sentra komoditas (Departemen Pertanian, 2001).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah digariskan visi pembangunan sektor pertanian, yaitu : *“terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi”*.

Merujuk pada visi sektor pertanian, selanjutnya dirumuskan visi pembangunan peternakan sebagai bagian dari sektor pertanian, yaitu: *“terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan kreatif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal”*.

Peternakan tangguh dapat dicirikan dengan diwujudkan sistem dan usaha agribisnis yang berjalan dengan baik sedangkan visi pembangunan peternakan yang berbasis sumber daya lokal mengandung makna kerakyatan, kesinambungan, dan desentralisasi.

Berdasarkan dan mengacu pada visi pembangunan peternakan, maka telah digariskan Misi Pembangunan Peternakan, yaitu : (1) memfasilitasi penyediaan pangan asal ternak yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitasnya, (2) memberdayakan sumberdaya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, (3) menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternakan, (4) membantu menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis peternakan, dan (5) melestarikan serta memanfaatkan sumber-daya alam pendukung peternakan (Departemen Pertanian, 2001).

Untuk mewujudkan misi tersebut, strategi yang ditempuh adalah (1) pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan, (2) pengembangan kelembagaan petani-peternak, (3) peningkatan usaha dan industri peternakan, (4) optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan serta perlindungan sumberdaya alam lokal, (5) pengembangan kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan, dan (6) pengembangan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Strategi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prakarsa masyarakat sendiri, sehingga operasionalisasi dan pilihan merupakan manifestasi keinginan masyarakat setempat. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan melalui pendekatan usahatani, komoditas, dan wilayah terpadu dalam kawasan pengembangan.

Tujuan pembangunan peternakan sendiri adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, terpenuhinya konsumsi pangan asal ternak, bahan baku industri, dan ekspor, tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya peranan keseimbangan kelembagaan kerja dan kesempatan berusaha, serta tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

Upaya penjabaran sasaran-sasaran tersebut telah dirumuskan dalam paket kebijakan fungsional produksi peternakan yang mencakup (1) pengembangan produksi

dengan faktor produksi yang terdiri atas peningkatan populasi, peningkatan produktivitas dan mutu produksi; serta (2) pengembangan usaha dan kelembagaan yang mencakup usaha, kelembagaan, pengembangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

### 2.1. Pengertian

Program pengembangan agribisnis berbasis peternakan secara operasional merupakan suatu proses pembangunan melalui pengembangan wilayah berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Arah pengembangan agribisnis peternakan seharusnya sudah mengakomodir lokal spesifik dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pada awalnya pembangunan agribisnis peternakan dapat difasilitasi dan diintroduksi oleh pihak pemerintah kemudian untuk selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh masyarakat di kawasan tersebut. Sehingga kawasan agribisnis peternakan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat berbagai pertumbuhan ekonomi wilayah. Selanjutnya dalam hal ini pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator.

Untuk membatasi penulisan kajian ini, berikut diuraikan mengenai definisi kelembagaan agribisnis, peternak, dan kelembagaan peternak sebagai berikut:

1. **Kelembagaan agribisnis** adalah lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Misalnya, lembaga pemerintah, koperasi, lembaga penelitian, dan sebagainya.
2. **Peternak** adalah pelaku usaha agribisnis yang sumber penghasilannya berasal dari pengelolaan usaha agribisnis peternakan baik usaha monokultur (peternakan saja) ataupun polikultur (terpadu dengan usaha agribisnis komoditas lainnya)
3. **Kelembagaan peternak** adalah organisasi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri yang didasari atas kesamaan kepentingan di bidang peternakan dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis.

### 2.2. Arah Pembangunan Kelembagaan Peternakan di Jawa Barat

Penegembangan kelembagaan peternak ditujukan untuk kemandirian dan ketangguhan kelompok peternak sebagai subyek pembangunan dan mampu mengangkat perekonomian rakyat. Pada umumnya, usaha yang dilakukan oleh kelembagaan peternak bersumber pada keterampilan yang dimiliki kelompok, modal sendiri dan seadanya. Sehingga dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan peternak diharapkan terjadi keterpaduan usaha mulai dari penanganan budidaya sampai pada pemasaran hasilnya. Oleh karena itu, upaya yang dapat ditempuh untuk pemberdayaan kelembagaan peternak tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong dan membimbing para peternak yang semula berusaha sendiri (usaha rumah tangga) agar mampu bekerjasama dibidang ekonomi secara berkelompok. Usaha tetap dijalankan di masing-masing keluarga, sedangkan aspek yang dikerjakasikan dalam kelompok seperti pengadaan sarana produksi, penjualan hasil produksi, dan upaya mendapatkan pendanaan dapat diusahakan dalam kelompok. Anggota kelompok terdiri dari para peternak yang saling mempercayai, saling kenal satu sama lain, dan mempunyai kepentingan bersama sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi.

2. Menumbuhkan gabungan kelompok yang usahanya sejenis atau sering juga disebut sebagai asosiasi, misalnya peternak ayam, domba, kambing, dan sebagainya. Tujuan dari ditumbuhkannya gabungan kelompok ini adalah untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya.

Arah dari pengembangan kelembagaan peternak adalah untuk membentuk kerjasama ekonomi dari berbagai pelaku agribisnis khususnya kelembagaan peternak. Terbentuknya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan usaha dan dapat menghasilkan nilai tambah pendapatan bagi peternak.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa kelembagaan peternak masih bersifat tradisional. Mereka tidak pernah memperhatikan sistem administrasi, walaupun ada tidak pernah di update. Begitu pula dengan sistem pertemuan yang dibangun. Biasanya pertemuan yang mereka lakukan tidak pernah rutin dilakukan, mereka lebih sering berdiskusi saat bekerja untuk memperoleh informasi dari peternak lainnya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) telah ditempuh melalui peningkatan Perilaku – Sikap – Keterampilan (PSK). Pada sektor peternakan, misalnya pelatihan, penyuluhan, dan pembuatan demplot melalui pendekatan kelembagaan/kelompok. Salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka efektivitas program/kegiatan pengembangan SDM peternakan adalah terbatasnya informasi kelembagaan kelompok peternak terutama di tingkat peternak. Informasi kelembagaan tersebut antara lain :

- Belum jelasnya jumlah kelompok peternak yang eksis di lapangan baik berdasarkan tingkatan kelompok (pemula, lanjut, madya, utama) maupun klasifikasi peternak berdasarkan tipologi usahanya (sambilan, cabang usaha, usaha pokok, industri).
- Belum terdatanya kelompok yang kegiatannya mendukung budidaya ternak di lapangan (kelompok usaha jasa alsin, kelompok pengolah hasil peternakan dan sebagainya).
- Belum terdatanya pelaku usaha peternakan berskala industri, yang dilakukan swasta maupun pemerintah (BUMN) khususnya terkait dengan penggunaan tenaga kerja.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, maka terdapat penambahan fungsi, personil dan asset untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Hal ini memberi kewenangan dan kesempatan yang lebih untuk kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk pemantauan/monitoring kegiatan pembangunan. Demikian pula halnya di bidang peternakan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsi pemantauan/ monitoring, antara lain melalui *up-dating* informasi kondisi peternakan terkini (*existing condition*), termasuk informasi kelembagaan kelompok peternak.

Informasi kelembagaan kelompok peternak yang komprehensif, valid dan *uptodate* diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, baik bagi pemerintah maupun stakeholder lainnya yang terkait. Untuk itu perlu adanya kegiatan penyusunan database kelembagaan yang dibentuk dalam suatu sistem informasi kelembagaan kelompok peternak yang dapat diakses setiap saat oleh berbagai pihak yang memerlukan.

### **2.3. Prinsip Pengembangan Kelembagaan Peternak**

Selama ini, dikenal 2 sifat kelembagaan peternak, yaitu kelembagaan mandiri dan kelembagaan bentukan. Kelembagaan mandiri adalah kelompok peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan dibentuk tanpa bantuan dari kelembagaan lainnya. Sedangkan kelembagaan bentukan adalah kelompok peternak yang dibentuk karena diinisiasi oleh kelembagaan lain, misalnya oleh pemerintah ataupun LSM. Biasanya kelembagaan bentukan akan terbentuk jika ada program atau kegiatan yang mengharuskan adanya pembentukan kelompok.

Kedua sifat kelembagaan tersebut mempunyai nilai positif dan negatif. Nilai positif dari kelembagaan mandiri adalah kelembagaan tersebut murni karena dibentuk secara *bottom up* atau dibentuk oleh peternak itu sendiri berdasarkan kebutuhan bersama. Selain itu, kelembagaan mandiri ini biasanya umurnya panjang atau bertahan lama karena dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama. Sedangkan nilai negatifnya adalah kelembagaan mandiri ini akan hancur bila tiap anggotanya sudah tidak lagi sejalan dengan dasar kepentingan kelompok. Nilai positif dari kelompok bentukan adalah terbentuknya kelompok difasilitasi dan mungkin didanai oleh institusi yang terkait dengan program atau kegiatan. Hanya saja, nilai negatifnya adalah umur dari kelompok bentukan tersebut biasanya tidak akan berjalan lama, paling tidak seumur program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.

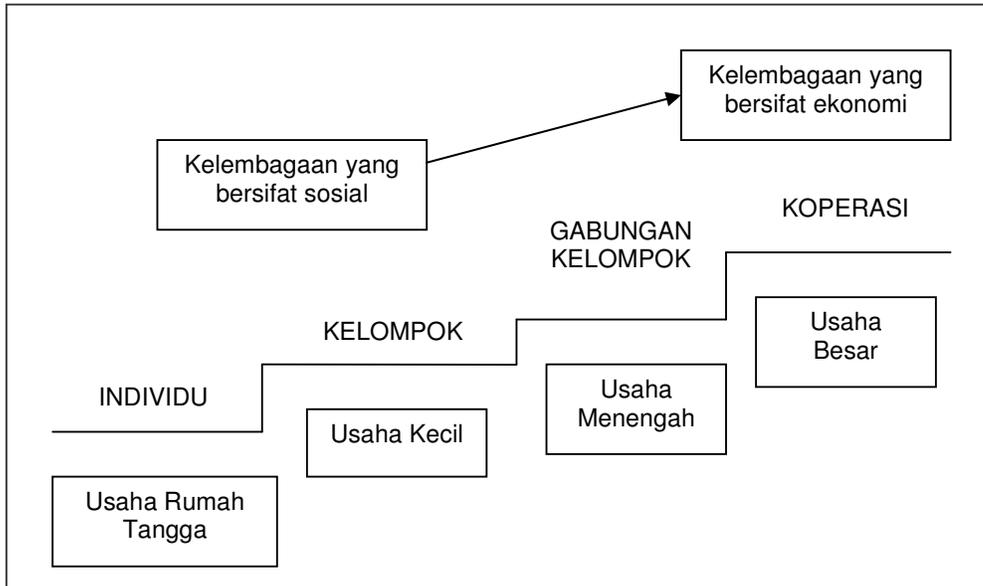
Kelembagaan peternak dapat tercapai dengan adanya kerjasama antar anggota kelompok yang dinamis, berlangsung proses diskusi dalam kelompok, para anggota kelompok melakukan hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan seluruh anggota kelompok turut berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi pengembangan kelembagaan peternak adalah adanya kerjasama yang utuh antar anggota kelompok yang didasari oleh kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bersama dengan pola partisipasi secara berkelompok dalam memecahkan permasalahan.

Berbagai kemudahan yang mungkin diperoleh bila dibentuk kelembagaan kelompok peternak, antara lain:

1. Dapat dengan mudah membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompok
2. Informasi dapat menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok
3. Inovasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota, baik teknologi pembibitan, pakan, budidaya, pasca produksi dan sebagainya.
4. Memudahkan dalam melakukan penyuluhan karena sudah terbentuk kelompok
5. Memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah
6. Memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal
7. Memudahkan dalam pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh kelompok

Hal-hal di atas merupakan jalan untuk membentuk kelompok yang mandiri dan tangguh. Dengan adanya ikatan yang kuat dalam kelompok, maka diharapkan kelembagaan peternak tidak hanya terbentuk dalam kelompok saja melainkan dapat ditransformasi menjadi koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM), seperti pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1. Transformasi Kelembagaan dari Kelembagaan Sosial Menuju Kelembagaan Ekonomi**



## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

---

#### **3.1. Lokasi dan Waktu**

Kegiatan ini dilakukan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Lama kegiatan adalah 5 (lima) bulan.

#### **3.2. Sampel Frame**

Sampel/unit analisis terdiri dari lembaga/kelompok peternak dan peternak sendiri sesuai dengan komoditas ternak yang diusahakan. Metode penentuan sampel lembaga/kelompok didasarkan pada informasi kelembagaan yang masih eksis yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kab./Kota. Dari lembaga/kelompok yang eksis ini akan dipilih 1 (satu) kelompok yang masing-masing mewakili 1 (satu) komoditas ternak secara *purposive*. Penentuan 1 (satu) sampel kelompok ini didasarkan atas kondisi lembaga dan komoditas pada setiap kabupaten/kota, sehingga antar kabupaten dapat berbeda. Selanjutnya pada setiap kelompok akan dipilih 1 - 3 orang peternak dengan menggunakan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Tujuan dari pengambilan sampel peternak adalah untuk memberikan gambaran dari usaha peternakannya.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan lembaga/kelompok peternak (ketua/pengurus kelompok), peternak sampel dan pihak yang terkait lainnya, seperti Dinas Peternakan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan pedoman/ kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari laporan/publikasi Dinas Peternakan Kab/Kota, laporan lembaga/kelompok peternak, serta literatur lainnya yang terkait.

Informasi/data primer yang dihimpun dari lembaga/kelompok antara lain : nama lembaga/kelompok, alamat, tahun pendirian, badan hukum/SK pendirian, alasan pendirian, kelas kelompok, jumlah anggota, jenis dan volume usaha/ kegiatan, proses pemilihan pengurus, proses pengambilan keputusan, pertemuan kelompok, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan upaya pemecahan yang dilakukan. Informasi yang dihimpun dari peternak antara lain : karakteristik peternak (umur, jenis kelamin, pekerjaan utama/sampingan, pengalaman beternak, jumlah tanggungan keluarga), karakteristik usahaternak (jumlah pemilikan/skala usaha, penggunaan input terutama tenaga kerja, sumber permodalan, penjualan ternak/ hasil ternak, penghasilan/pendapatan usahaternak).

Data sekunder yang dihimpun antara lain: jumlah dan jenis kelembagaan kelompok peternak di bidang budidaya (*on-farm*) dan kelembagaan pendukungnya (seperti lembaga sarana produksi, pengolahan hasil ternak/agroindustri), tahun berdiri,

alamat, badan hukum/SK pendirian, kelas kelompok, jumlah anggota dan jenis kegiatan/usaha.

#### **3.4. Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan pengolahan data untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan kepentingan studi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan statistika deskriptif (seperti mean/rataan, standar deviasi, proporsi/persentase). Analisis tersebut mencoba mendeskripsikan :

- Profil lembaga/kelompok dan usaha/kegiatan kelompok;
- Profil peternak dan usahaternak;
- Rekomendasi pengembangan lembaga/kelompok.

## BAB 4 PEMBAHASAN

---

Penyusunan data base kelompok peternak merupakan langkah awal untuk membangun kelembagaan kelompok peternak. Pemanfaatan data base kelembagaan kelompok peternak, tidak hanya diperlukan oleh dinas atau instansi pemerintah saja melainkan juga bagi stakeholder yang membutuhkan data tersebut. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan membangun data base kelompok peternak adalah sebagai berikut:

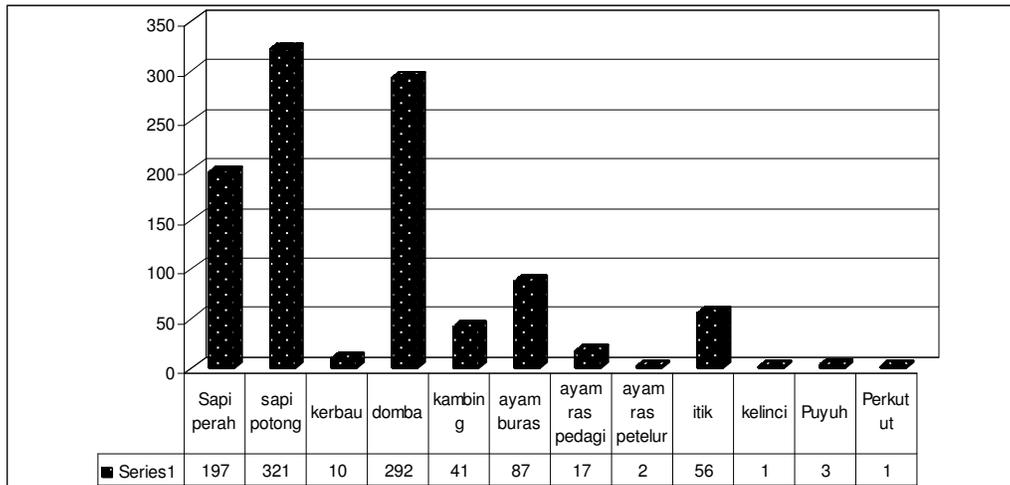
1. Teridentifikasinya kelembagaan kelompok peternak di berbagai kabupaten/kota
2. Dapat mendeteksi mana kelompok yang aktif dan tidak
3. Dapat dimanfaatkan oleh berbagai program atau kegiatan yang melibatkan kelompok peternak
4. Dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kelembagaan peternak.

Gambaran umum berdasarkan hasil survei kelembagaan kelompok peternak yang dilakukan di 13 kabupaten/kota yang berada di wilayah timur Jawa Barat, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. **Dokumentasi Data Kelembagaan Kelompok Peternak dari Dinas/Subdinas Lingkup Peternakan.** Data kelembagaan kelompok peternak yang diperoleh dari dinas/subdinas lingkup peternakan, adalah sebagai berikut:
  - a. Rata-rata kelompok peternak yang terdokumentasikan belum terupdate dengan baik atau terkoreksi berdasarkan kondisi saat ini. Hal ini disebabkan tidak dana program atau kegiatan untuk mendata kelompok-kelompok peternak di kabupaten/kota.
  - b. Kelompok-kelompok peternak yang didokumentasikan adalah kelompok peternak yang mengikuti program atau kegiatan dari dinas/subdinas lingkup peternakan atau dengan istilah lainnya merupakan kelompok-kelompok hasil bentukan dari dinas/subdinas lingkup peternakan.
  - c. Kelompok-kelompok mandiri jarang sekali diidentifikasi karena tidak adanya informasi mengenai keberadaan kelompok peternak tersebut, kecuali bila kelompok tersebut mengunjungi dinas/subdinas lingkup peternakan untuk dilibatkan dalam program atau kegiatan dinas/subdinas.
2. **Pembinaan.** Pembinaan kelompok peternak yang dilakukan oleh dinas/subdinas lingkup peternakan hanya dilakukan pada saat adanya program atau kegiatan, sedangkan bila program atau kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan maka tidak ada lagi pembinaan.
3. **Dokumentasi Kelembagaan Peternak dari Koperasi Persusuan.** Data kelembagaan kelompok peternak yang diperoleh dari Koperasi Persusuan lebih *up to date* dengan baik karena pihak koperasi mempunyai kepentingan dengan kelompok-kelompok peternak tersebut, terutama dalam hal distribusi susu, pembayaran hasil penjualan susu, pembinaan dan penyuluhan, penyaluran sarana produksi peternakan, dan sebagainya. Kelompok-kelompok peternak sapi perah yang terbentuk, biasanya di bagi dalam bentuk wilayah-wilayah untuk memudahkan dalam koordinasi.

4. **Kelembagaan Kelompok Peternak di Daerah Perkotaan.** Kelompok peternak yang berada di daerah perkotaan umumnya relatif sedikit yang terdokumentasikan dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Usaha yang dilakukan biasanya adalah usaha budidaya yang mengarah penggemukan, seperti domba, kambing, dan sapi potong. Di daerah perkotaan belum ada kelompok yang mengarah pada usaha pengolahan komoditas peternakan.
5. **Eksistensi Kelompok Peternak.** Eksistensi kelompok peternak sering kali dikaitkan dengan usaha yang mereka geluti. Keberadaan kelompok peternak sangat terkait dengan usaha peternakan yang mereka usahakan. Secara umum, kelompok peternak yang lebih eksis dilihat dari usaha peternakan yang diusahakannya adalah kelompok peternak sapi perah dan sapi potong (khususnya kelompok peternak yang berada dalam satu kawasan). Eksistensi kelompok peternak sapi perah sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kelompok peternak sapi perah sudah sejak lama eksis dalam usaha peternakannya karena usaha ini bersifat vertikal, bersifat oligopoli, dan produk yang dihasilkannya sama, yaitu susu. Sedangkan kelompok peternak sapi potong lebih cenderung eksis pada kelompok usaha sapi potong perbibitan dan penggemukan yang berada dalam satu hamparan atau kawasan. Hal ini sangat terkait erat dengan pengelolaan usahanya, karena bila usaha tersebut dalam satu kawasan akan memudahkan dalam berbagai hal, seperti koordinasi, penyuluhan, penyaluran bibit, penjual hasil, dan sebagainya.
6. **Jumlah Keanggotaan.** Jumlah anggota kelompok peternak berdasarkan hasil survei sangat beragam dengan kisaran 5 – 70 orang dalam satu kelompok. Jumlah besar kecil anggota kelompok akan berdampak pada pengelolaan kelompok. Jumlah anggota yang lebih kecil akan lebih mudah mengelolanya dibandingkan dengan kelompok dalam jumlah besar. Beberapa literatur merekomendasikan bahwa jumlah anggota kelompok yang ideal sebanyak 20 – 25 orang per kelompok. Hal ini berkaitan erat dengan keberlanjutan kelompok tersebut di mana bila kelompok tersebut aktif maka dapat ditransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro atau membentuk wadah koperasi.
7. **Status Kelembagaan Kelompok Peternak.** Secara umum kelembagaan kelompok peternak masih berstatus kelompok peternak pemula. Hanya sedikit sekali kelompok yang sudah berstatus madya dan lanjut.

Hasil identifikasi terhadap kelembagaan kelompok peternak di 13 kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat 1.028 kelompok peternak dari berbagai komoditas peternakan yang diusahakannya. Berdasarkan Gambar 4.1, kelembagaan kelompok peternak sapi potong lebih mendominasi dibandingkan dengan kelompok kelembagaan lainnya, yaitu sebanyak 321 kelompok (31,2%). Sedangkan kelompok peternak domba menempati urutan ke dua dengan jumlah 292 kelompok (28,4%) dan kelompok peternak sapi perah menempati urutan ke tiga sebanyak 197 kelompok (19,2%). Sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok peternak perkutut yang hanya satu kelompok. Berdasarkan data tersebut dapat menunjukkan bahwa wilayah timur Jawa Barat lebih didominasi oleh kelompok peternak sapi potong, sapi perah dan domba. berarti komoditas peternakan tersebut lebih banyak diminati oleh masyarakat wilayah timur Jawa Barat sebagai salah satu usaha.



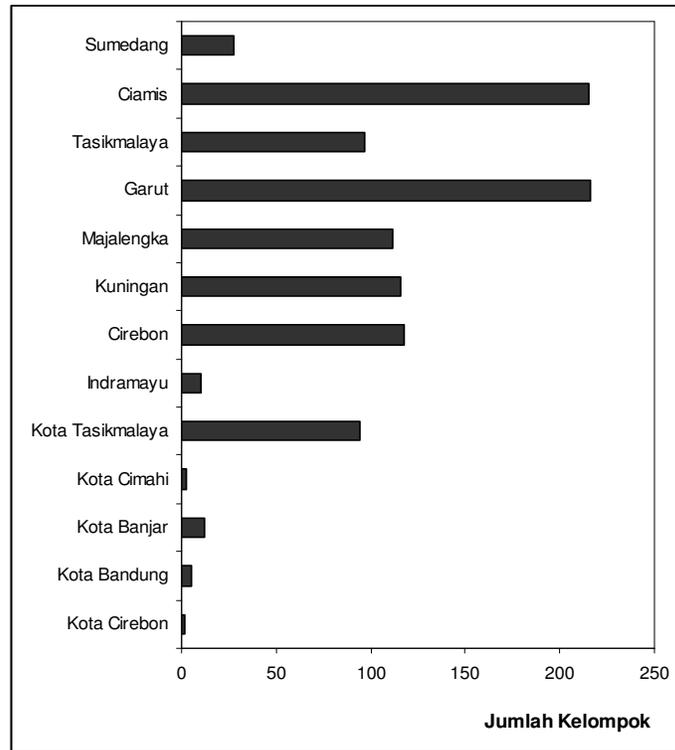
**Gambar 4.1. Kelembagaan Kelompok Peternak dengan Berbagai Komoditas Peternakan yang Diusahakan**

Bila kita lihat dari tiap kabupaten/kota, kelembagaan kelompok peternak pada masing-masing wilayah mempunyai jumlah kelompok peternak yang berbeda-beda. Rata-rata untuk wilayah perkotaan, jumlah kelompok peternaknya lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah kabupaten, kecuali Kota Tasikmalaya yang mempunyai jumlah kelompok peternak sebanyak 94 kelompok (lihat Gambar 4.2). Hal tersebut dapat dimungkinkan karena sebagian besar wilayah di Kota Tasikmalaya masih berstatus perdesaan sehingga wajar masih terdapat banyak kelompok peternak.

Jumlah kelompok peternak di Kabupaten Garut lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sebanyak 216 kelompok. Kelompok peternak yang mendominasi di Kabupaten Garut adalah kelompok peternak sapi perah, disusul oleh kelompok peternak domba dan ayam buras. Sedangkan Kabupaten Ciamis, jumlah kelompok peternaknya sebanyak 215 kelompok. Dominasi kelompok peternak cenderung pada kelompok peternak sapi potong dan domba. Adapun kabupaten/kota yang memiliki jumlah kelompok peternak paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya adalah Kota Cirebon, yaitu hanya terdapat 2 kelompok peternak saja.

Potensi kelompok peternak seperti yang telah ditampilkan di atas, mengindikasikan bahwa masih terbukanya peluang bagi pengembangan kelembagaan kelompok peternak di masa depan. Hanya saja, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan kelompok peternak adalah harus dilakukan pendataan ulang terhadap kelompok-kelompok peternak yang berada di wilayah masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui mana saja kelompok yang masih eksis atau tidak. Di samping itu, pendataan tersebut dapat mengetahui kelompok mana saja yang sudah berkembang lebih maju dari pada sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus jika kelembagaan kelompok ini sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan peternakan. Peternakan berbasis kelompok peternak sangat berguna bagi pembangunan peternakan di masa depan karena berbagai kemudahan akan diperoleh dengan cara berkelompok. Namun, yang perlu diingat adalah

basis pembentukan kelompok harus atas dasar keinginan bersama para anggota kelompok melalui musyawarah dan mufakat.



**Gambar 4.2. Jumlah Kelembagaan Kelompok pada Masing-masing Kabupaten/Kota**

## BAB 5 KESIMPULAN

---

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelembagaan kelompok peternak dalam rangka penyusunan data base kelembagaan peternak, maka dapat disimpulkan dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pendataan Ulang Kelompok Peternak yang Menjadi Binaan Dinas/Subdinas Lingkup Peternakan.** Pendataan ulang kelembagaan kelompok peternak sangat penting dilakukan dalam rangka perbaikan kelompok dan mendata eksistensi dari kelompok itu sendiri.
2. **Seleksi Kelembagaan Peternak.** Hasil data base kelembagaan peternak dapat dimanfaatkan untuk menseleksi kelompok peternak mana saja yang memiliki kemampuan untuk berkembang atau maju.
3. **Perubahan Paradigma Statis di Kelompok.** Posisi tawar peternak relatif lebih rendah dibandingkan pedagang. Kegiatan pemasaran secara umum memperoleh porsi nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah yang dinikmati peternak. Kondisi ini sering menjadi tidak kondusif, dimana harga produk yang diterima peternak tidak memberikan stimulan bagi proses produksi selanjutnya. Dengan data base kelembagaan ini, kita dapat mengubah paradigma kelompok peternak agar meningkatkan usaha beternaknya menuju orientasi pasar.
4. **Pemberdayaan Kelompok.** Secara konseptual pemberdayaan masyarakat pertanian cakupannya dapat dipersempit menjadi pemberdayaan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini mencakup pemberdayaan masyarakat agribisnis maupun pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan kelompok usaha. Berdasarkan pengertian di atas titik tolak pemberdayaan peternak adalah pengembangan potensi yang dimiliki peternak supaya masyarakat mampu secara mandiri untuk menopang hidupnya. Oleh karena itu harus melibatkan sejumlah sumberdaya yang dikuasai masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi/usaha secara mandiri dengan posisi tawar yang cukup. Makin besar sumberdaya dikuasai masyarakat peternak, proses pemberdayaan mempunyai peluang yang makin besar untuk sampai pada tujuan pemberdayaan.
5. **Transformasi Kelompok Menjadi Koperasi atau LKM.** Dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasai peternak, modal merupakan faktor produksi yang paling lemah. Dengan demikian penguatan modal usaha kelompok akan sangat bermakna menjadi pemantik bagi berlangsungnya kegiatan agribisnis peternakan. Banyak faktor yang akan menjadi terbangkitkan dengan ketersediaan modal. Kegiatan usahaternak akan berjalan karena sumberdaya tenaga kerja atau sumberdaya lainnya yang dikuasai peternak akan berkombinasi dengan faktor produksi modal yang dikuasai peternak, membentuk aktivitas usaha yang produktif. Dengan adanya aktivitas kelompok yang semakin berkembang, bertambahnya modal kelompok, dan bertambahnya jumlah anggota kelompok, maka secara otomatis kelembagaan kelompok tersebut dapat ditransformasi menjadi lembaga koperasi atau lembaga keuangan mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Agribisnis Departemen Pertanian,. 1998. Kemitraan : Kebijakan dan Penjelasan Pola Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2003. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Umum Penyusunan Kegiatan Proyek Pembangunan Pertanian Tahun 2002. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2003. Petunjuk Teknis Bagian Proyek Pengembangan Sarana dan Prasarana Agribisnis Peternakan Jawa Barat T.A 2003. Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Bandung
- Dinas Peternakan. 2003. Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Jawa Barat. Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Bandung
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. 1998. Materi Pembinaan Kemitraan Usaha Pengolahan hasil Peternakan. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.
- Gittinger, P. 1982. Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian. Edisi Kedua. Penerbit UI Press. Jakarta.
- Haeruman, H.J.S. 1997. Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa: Kearah Integrasi Perekonomian Kota-Desa. Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Perdesaan Indonesia. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Kadariah, Lien Karlina, dan Clive Gray. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Edisi Ketiga. LP3ES. Jakarta
- Soetrisno L. 1995. Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan Indonesia. Makalah Seminar Internasional Strategi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis di Indonesia: Refleksi dan Aktualisasi 40 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sri Rahayu, Sondi Kuswaryan, dan Achmad Firman. 2003. Kelayakan Ekonomi Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong dalam Upaya Penghematan Devisa Impor. Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran. Bandung
- Sulistyo dan Sri R. 1994. Potensi dan Prospek Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam Mubyarto "Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal". Aditya Media. Yogyakarta.
- Suryadi, D. 1993. Potensi Ekonomi Ternak Ayam Petelur Jantan Sebagai Alternatif Sumber Usahaternak Penghasil Daging. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.